

# PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA MELALUI INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

Achmad Anwar Abidin

Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Gresik, Indonesia

E-mail: abidelfeiz@yahoo.co.id

**Abstract:** These article discusses about the forming of student's characters through the internalization of anti-corruption values. In which the form of internalization of the value can be realized with anti-corruption education for children, especially children of elementary school, where they have an important role in the forming and realization of the nation's future. From this case, it can be seen that corruption prevention efforts might be done in two steps, namely repressive and preventive measures. Repressive measures are carried out by enforcing strict law enforcement by law enforcement officers, and preventive measures are carried out through education. The important values which can be realized in the anti-corruption education process are; responsibility, discipline, honesty, simple life-giving, hard work, self-reliance, fairness and caring. By investing the value through Islamic learning anti-corruption education can be performed to put forward and become one of the main reference curriculum educations in Indonesia.

**Keywords:** Internalization, value, and anti-corruption.

## Pendahuluan

Korupsi memang merupakan problematika yang cukup pelik, melilit dan menghinggap dihampir seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Bagi telinga rakyat Indonesia, korupsi bukanlah hal yang asing lagi. Teriakan-teriakan aksi untuk pemberantasan korupsi telah bergema kencang, baik pada kasus kepala daerah, menteri hingga ketua dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan secuil kasus korupsi yang sangat kompleks. Padahal mereka merupakan *public figur* yang notabeneanya sebagai pemimpin dan lembaga representatif untuk menjadi '*uswah*' dan penggerak nilai-nilai karakter budaya, baik secara normatif ataupun kolektif.

Dalam sebuah buku yang bertajuk *Agama Sebagai Kritik Sosial* menyebutkan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2012 menyatakan bahwa korupsi terbesar di negeri ini justru terjadi di Departemen Agama, menyusul kemudian Departemen Pendidikan Nasional yang didalamnya penuh dengan orang-orang yang semesta-tinya menjadi teladan moral bagi masyarakat luas.<sup>1</sup> Adapun Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2012 sebesar 3,55 dari skala 5. Artinya masyarakat Indonesia cenderung anti korupsi. Catatan: nilai indeks 0–1, 25 sangat permisif terhadap korupsi, 1, 26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi. IPAK di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi (3, 66) dibanding di wilayah perdesaan (3, 46).<sup>2</sup>

Oleh karenanya tidak heran pula ketika organisasi *Retting Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* Hongkong pada tahun 2012, ikut melaporkan hasil survey yang diperolehnya bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara terkorup di Asia.<sup>3</sup> Kegeraman masyarakat terhadap perilaku korupsi memang tidak bisa dipungkiri, tetapi mereka sudah tidak berdaya untuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun untuk melawannya. Mirisnya lagi tindak prilaku korupsi juga telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat seperti pengurusan surat menyurat di lingkungan RT/RW hingga pada layanan public seperti pemberian suap pada Polisi dan beberapa petugas lain.<sup>4</sup>

Untuk dapat meredam adanya perilaku tindak korupsi yang lebih menjalar lagi, maka dibutuhkan strategi yang kokoh, yaitu dengan dirancangnya pendidikan antikorupsi oleh beberapa lembaga pendidikan. Gagasan ini lahir dimaksudkan untuk membasmi korupsi melalui persilangan (*intersection*) antara pendidikan karakter dengan pendidikan kewarganegaraan. Disamping itu, pendidikan untuk mengurangi korupsi berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi bebas dari budaya korupsi.

---

<sup>1</sup> Moh. Asror Yusuf, ed., *Agama Sebagai Kritik Sosial Di Tengah Arus Kapitalisme Global* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012).

<sup>2</sup> Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, “Laporan Ringkas Survei Prilaku Antikorupsi 2012: Indeks Perilaku Anti Korupsi Dan Indikator Tunggal” (Jakarta, 2012). 11

<sup>3</sup> Ridwan Nasir, ed., *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer* (Surabaya: IAIN Press, 2006). 34

<sup>4</sup> Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, “Laporan Ringkas Survei Prilaku Antikorupsi 2012: Indeks Perilaku Anti Korupsi Dan Indikator Tunggal.” 12

Secara simplistik memang sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan (*approach*), *pertama*: menjadikan peserta didik sebagai target, dan, *kedua*: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*. Dalam hal ini, pendidikan Islam perlu mengembangkan nilai anti-korupsi. Sebab dalam sistem pendidikan Indonesia, baik dalam kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hingga Kurikulum 2013 belum sepenuhnya termuat materi mengenai permasalahan korupsi di Indonesia secara langsung.

Pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung, yaitu melalui pengaitan atau inegrasi materi pembelajaran secara kontekstual dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan tindakan korupsi. Selain itu, media pembelajaran berupa buku-buku paket pelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar masih sangat sedikit yang memuat secara langsung materi permasalahan tindakan korupsi. Dari adanya upaya pencegahan tersebut, diyakini mampu mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa. Hal ini yang tidak kalah penting ialah mampu memberantas korupsi melalui gerakan preventif, karena upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya dan bahkan selama-lamanya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan khususnya pendidikan Islam merupakan bagian integral dari pendidikan Indonesia yang memiliki peran penting dalam mengembangkan nilai antikorupsi. Pendidikan Islam bisa dijadikan sebagai sarana upaya preventif dan antisipatif dalam mengembangkan nilai antikorupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Karena manusia-manusia yang lahir melalui sektor pendidikan adalah manusia - manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan profesionalitas serta sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan disaat institusi lain tidak berdaya melakukan perlawanan terhadap korupsi, maka institusi pendidikan (Islam) dapat dijadikan benteng terakhir tempat menyebarkan nilai-nilai anti korupsi.

## Pentingnya Berkarakter Anti Korupsi

Karakter dapat diartikan sebagai “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”.<sup>5</sup> Selanjutnya berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak”. Menurut Tadkiroatun Musfiroh, karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*).<sup>6</sup> Dengan kata lain berkarakter bereati memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia.

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka dan tertib. Adapun pendidikan karakter dapat didefinisikan dengan suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku (karakter) kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “*the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development*”.<sup>7</sup>

Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (*stakeholders*) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler,

---

<sup>5</sup> Kemendikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Balai Pustaka, 2012). 234

<sup>6</sup> Tadkiroatun Musfiroh, *Pendidikan Strategis Untuk Pendidikan Masa Depan* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008). 13

<sup>7</sup> Lilis. Lestari, “Pendidikan Karakter Di Sekolah,” in *Pendidikan Karakter*, n.d.

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter sebagaimana dijelaskan di atas.

Pendidikan karakter terkait dengan tingkah laku siswa. Tingkah laku berasal dari kata tingkah dan laku. Tingkah berarti gerak, olah sedangkan laku berarti sikap, perbuatan.<sup>8</sup> Menurut Abu Ahmadi tingkah laku adalah sikap seseorang yang dimanifestasikan ke dalam perbuatan, hal ini juga diartikan oleh Hasan Langgulung yang dikutip oleh Ahmadi yang menyatakan bahwa tingkah laku adalah segala aktifitas seseorang yang dapat diamati.<sup>9</sup>

Sedangkan perilaku korupsi dapat diartikan sebagai sebuah tindakan meminta (pemerasan)/memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat).<sup>10</sup> Adapun dalam konteks sejarah, korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.<sup>11</sup>

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat sebagai perdana menteri telah menulis buku berjudul "*Arthashastra*", dimana ia membahas masalah

---

<sup>8</sup> Yaljan, *Kecerdasan Moral, Aspek Pendidikan Yang Terlupakan* (Yogyakarta: Pustaka, 1997). 481

<sup>9</sup> Abu Ahmadi, *Pendidikan Karakter Sebuah Tantangan* (Jakarta: Citra Wacana, 2007). 34

<sup>10</sup> Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, "Laporan Ringkas Survei Prilaku Antikorupsi 2012: Indeks Perilaku Anti Korupsi Dan Indikator Tunggal."

<sup>11</sup> Nasir, *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer*. 54

korupsi pada masa itu.<sup>12</sup> Dalam literatur Islam, pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.<sup>13</sup> *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.<sup>14</sup> Huntington mengungkapkan bahwa korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends*.<sup>15</sup> .Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut dalam masyarakat.

Sebagaimana definisi di atas, maka adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut dalam masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*), maka tindak tersebut merupakan tindak korupsi yang harus ditindak secara tegas. Simpulan ini sama halnya dengan ulasan Syed Husein Alatas dalam Azra yang dikutip oleh Anwar dimana dinyatakan bahwa “*Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*”, Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.<sup>16</sup> Dari analisa di atas maka dapat di klasifikasi beberapa unsur yang terdapat pada tindak korupsi yaitu: *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi

---

<sup>12</sup> Ahmad Fawa'id and Sul-tonul Huda, eds., *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir Dan Fiqih* (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006).

<sup>13</sup> Muhammad Azhar and Dkk, *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003). 67

<sup>14</sup> Nasir, *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer*. 57

<sup>15</sup> Samuel P Huntington, *Political Order in Changing Societies*, ed. Yale University Press, 1968. 59

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006).

kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

### **Sebuah Upaya Menindak tindakan Korupsi**

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena, perlu ada paradigma baru (*new paradigm*) yang merupakan perubahan paradigma (*shifting paradigm*) ke arah yang lebih baik dan komprehensif dalam memahami upaya pemberantasan korupsi. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (*habit*) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Adapun karakteristik atau ciri-ciri, serta unsur-unsur korupsi dapat diketahui sebagaimana berikut :

- a. *Penyuapan (bribery)* mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
- b. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber dayayang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
- c. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
- d. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
- e. *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- f. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
- g. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau “korupsi berjama’ah”.

Kemudian Jeremy Pope mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *“Toward a General Theory of Official Corruption”* – menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

- a. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
- b. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
- c. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
- d. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
- e. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, serta memeras.
- f. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
- g. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
- h. Penyuaapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, memintakomisi.
- i. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
- j. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.
- k. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
- l. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
- m. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
- n. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
- o. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
- p. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
- q. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
- r. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.



- s. Menyalah gunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.<sup>17</sup>

### **Pendidikan Islam sebagai pembentuk karakter muslim yang antikorupsi**

Karakter muslim merupakan sebuah pembawaan yang bertumpu pada sikap *releginsitas* dan kepatuhan seseorang terhadap agama, dan ukuran dari karakter tersebut terletak pada tingkat kepatuhan dan kepandaianya dalam memahami agama, dan pada keadaan itulah seorang muslim mengalami kedewasaan rohaniah. Adapun untuk menentukan bisa dan siapa-siapa yang telah mencapai keadaan itu, ialah wewenang tuhan. Pendidikan dapat diusahakan manusia, tetapi penialain tertinggi mengenai hasilnya adalah Tuhan Yang Maha mengetahui. Kita hanya dapat mengetahui dari cirinya saja yaitu adanya perubahan sikap dan tingkah laku sesuai petunjuk ajaran Islam.

Untuk menunjang itu semua perlu adanya usaha, kegiatan, cara, alat dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya sebagaimana orang Mekkah yang tadinya peyembah berhala, musyrik, kafir, kasar dan sombong, maka dengan usaha dan kegiatan nabi meng-Islamkan mereka berubah menjadi penyembah Allah Yang Maha Esa. Mereka telah berkepribadian muslim sebagaimana yang diajarkan oleh ajaran Islam. Dengan itu nabi telah mendidik, membentuk kepribadian yaitu kepribadian muslim dan sekaligus berarti bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendidik yang berhasil. Apa yang beliau lakukan dalam membentuk manusia, dapat kita contoh untuk rumuskan pendidikan Islam saat ini. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam itu adalah pembentukan kepribadian muslim.

Karakter muslim adalah kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya, baik tingkah laku, kegiatan-kegiatan jiwa, maupun filsafat hidup dan kepercayaannya menunjukkan pengabdian terhadap Tuhan, menyerahkan diri terhadap-Nya. Dan hanya dengan melalui proses pendidikan yang terencana baik, kepribadian manusia dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau paling tidak, dapat mendekati tujuan tersebut.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional (Terj)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003). xxvi

<sup>18</sup> Arifin, *Imu Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003). 16

Dalam hubungannya dengan pendidikan Islam pengembangan kepribadian seseorang merupakan suatu keadaan bagi perwujudan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Nilai dan norma Islami yang harus di internalisasi kedalam pribadi seseorang, dijabarkan kedalam sistem kependidikan secara makro dan mikro. Secara makro berarti nilai dan norma Islami mendasari proses penetapan kebijakan umum yang mengarahkan dan memberi ruang lingkup perencanaan program operasional kependidikan, baik secara institusional maupun psikologis. Sedangkan secara mikro berarti pendidikan secara operasional sebagai proses yang melaksanakan program-program kependidikan yang bertujuan merealisasikan nilai-nilai dan norma Islami tersebut. Dan pendidik bukan hanya bertugas menyediakan dan menciptakan kondisi belajar yang kondusif bagi subyek didik, tetapi lebih dari itu dituntut turut membentuk kepribadiannya dengan turut menampilkan keteladanan-keteladannya. Pendidikan terutama pendidikan agama Islam sangatlah berperan penting terhadap pembentukan kepribadian muslim. Oleh karena itu, pendidikan Islam merupakan proses transformasi nilai-nilai dan norma-norma Islam dalam pribadi anak didik. Selain itu juga tujuan utama dari pendidikan Islam adalah untuk menyempurnakan cita (idealitas) dari kepribadian yang dibinanya.

Bagi umat Islam, usaha pengembangan pribadi muslim ini benar-benar sudah dipermudah dengan adanya anugerah Allah SWT berupa sarana-sarana yang sangat vital untuk mengembangkan pribadi Muslim. Sarana-sarana itu adalah tuntunan al-Quran yang maha benar dengan al-Hadits sebagai petunjuk pelaksanaannya, ibadah-ibadah yang dapat mempertinggi derajat keruhanian, dan potensi-potensi serta kemampuan luar biasa manusia yang menandakan mereka tergolong makhluk bermartabat yang mampu mengubah nasib sendiri. Bahkan dipermudah dengan adanya tokoh idaman dan tokoh umat, yaitu Nabi Muhammad Saw sendiri yang dimasyhurkan memiliki akhlak al-Quran, keluhuran budi pekertinya mendapatkan pujian langsung dari Allah, dan memperbaiki akhlak manusia merupakan salah satu misi kerasulannya. Masalahnya adalah sejauh mana manusia mampu meningkatkan kapasitas diri kearah citra pribadi Muslim yang digambarkan al-Quran?<sup>19</sup>

Dalam ruang lingkup pendidikan Islam telah jelas bahwa dengan pendidikan Islam kita berusaha untuk membentuk manusia yang

---

<sup>19</sup> Abd. Halim Soebahar, *Wawasan Baru Pendidikan Islam* (Pasuruan: PT. Groeda Buana Indah, 1992). 80

berkepribadian kuat dan baik (*ahlāq al-karīmah*) berdasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itulah pendidikan Islam sangat penting sebab dengan pendidikan Islam, orang tua atau pendidik berusaha secara sadar memimpin dan mendidik anak diarahkan kepada perkembangan jasmani dan rohani sehingga mampu membentuk kepribadian yang utama sesuai dengan ajaran Islam.

Tidak dapat dipungkiri perkembangan agama pada seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman hidupnya sejak kecil; baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat terutama pada masa pertumbuhan perkembangannya. Oleh sebab itu, seyogyanyalah pendidikan agama Islam ditanamkan dalam pribadi anak sejak ia lahir bahkan sejak dalam kandungan dan kemudian hendaklah dilanjutkan pembinaan pendidikan ini disekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam mempunyai tujuan kurikuler yang merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang sistem pendidikan nasional No.20 tahun 2003, yaitu: pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Dalam mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional, pendidikan agama Islam disekolah memegang peranan penting. Mengingat betapa pentingnya pendidikan agama Islam dalam mewujudkan harapan setiap orang tua, masyarakat, *stakeholder* dan membantu terwujudnya tujuan pendidikan nasional, maka pendidikan agama Islam harus diberikan dan dilaksanakan disekolah dengan sebaik-baiknya.<sup>21</sup>

Perlu untuk diketahui bahwa karakter muslim itu tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui beberapa faktor yang mempengaruhi. faktor-faktor tersebut antara lain, *pertama* faktor biologis, *kedua*: faktor sosial, *ketiga* faktor kebudayaan.<sup>22</sup> Faktor biologis yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau sering disebut faktor psikologis, faktor ini berasal dari keturunan atau pembawaan yang

---

<sup>20</sup> Kementrian Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003* (Bandung: Fokus Media, 2009).

<sup>21</sup> Abdul Majid and Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).140

<sup>22</sup> Ngalam Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988). 163

dibawa sejak lahir yang mempunyai peranan pada beberapa unsur kepribadian dan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Sedangkan yang dimaksud faktor sosial adalah suatu komunitas atau lingkungan masyarakat yang ada disekitar individu, termasuk didalamnya adat istiadat peraturan yang berlaku dan bahasa yang digerakkan. Sejak anak dilahirkan sudah mulai bergaul dengan orang sekitar. Begitu juga faktor kebudayaan, faktor ini termasuk pula didalamnya faktor sosial, karena kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan dan kebudayaan masyarakat dimana anak itu dibesarkan. Karena keduanya mempunyai nilai yang harus dijunjung tinggi oleh manusia yang hidup dalam komunitas tersebut. Mentaati dan mematuhi nilai yang menjadi kewajiban bagi setiap anggota masyarakat. Kepribadian yang juga dalam kaitannya ini ialah karakter, tumbuh dan berkembang atas dua kekuatan besar, yaitu kekuatan dari dalam yang berupa faktor biologis dan kekuatan dari luar yang berupa faktor sosial dan faktor kebudayaan. Ki Hajar Dewantara mengistilahkan kedunta dengan menggunakan istilah faktor ajar bagi faktor eksteral dan faktor dasar bagi faktor intern.<sup>23</sup>

Seseorang dikatakan berkepribadian muslim apabila didalam hatinya telah tertanam keimanan atau keyakinan tentang adanya Allah Yang Maha Esa, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Kiamat dan Qodar. Selain itu, adanya pengakuan yang diucapkan dalam bentuk syahadat dan kemudian dibuktikan dalam bentuk amaliah yang nyata berupa ibadah kepada Allah merupakan wujud dari keimanan manusia kepada-Nya, tidak berhenti dalam ranah tersebut, selanjutnya ia juga senantiasa meyakini bahwa dirinya merupakan makhluk Allah yang selalu diawasi oleh-Nya, sehingga dalam tindak lakunya, manusia senantiasa melalukan hal-hal yang baik dan bermanfaat kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS; Al-Nisa' ayat 136 yang menyebutkan bahwa, *tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitabnya, Rasul-rasul-Nya dan hari kemudian maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.*<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Agus Suyanto, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1998). 272

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al Quran Dan Terjemah" (2009). 145

Kepribadian muslim adalah kepribadian yang tingkah lakunya menunjukkan diri pengabdian kepada Allah. Kepribadian muslim adalah kepribadian dimana setelah ia beriman akan dilanjutkan dengan melaksanakan syariat Islam dengan patuh mengerjakan ibadah sesuai dengan rukun Islam dengan penuh kesadaran dan pengertian. Dan selalu berbuat kebaikan dimanapun ia berada (merasa dirinya diawasi oleh-Nya). Allah juga mengingatkan bahwa barang siapa yang benar-benar beriman dan mengaharap perjumpaan dengan-Nya kelas, maka hendaklah beramal sholeh, sebagaimana firman Allah QS: Al-Kahfi ayat 110, "*Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhan, maka hendaklah ia mengerjakan amal sholeh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya.*"<sup>25</sup>

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki falsafah hidup sebagai pegangan dalam berbangsa dan bernegara. Falsafah hidup ini terkonsep dalam Pancasila, dan Pancasila ini pula menjadi falsafah pendidikan nasional sebagai pedoman membangun dan membentuk kepribadian bangsa seutuhnya yang memiliki ciri khas sebagai bangsa indonesia. Membangun bangsa yang berkarakter harus dimulai dengan membangun manusia seutuhnya, sebagai peran pada manusia yang berpancasila. Hakekat martabat manusia merupakan kesatuan yang integral yang meliputi; manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk susila, dan manusia sebagai makhluk ber-Tuhan.<sup>26</sup>

Manusia sebagai makhluk individu, berarti manusia merupakan keseluruhan yang tak bisa dibagi. Sehingga dapat diambil suatu pengertian, bahwa manusia tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raganya, rohani maupun jasmaninya. Sehingga kegiatan jiwa manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan keseluruhan jiwa raga yang tak terlepas dari yang lain. Hal ini sesuai dengan konsep Islam tentang kepribadian individualitas manusia. Dimana manusia secara individual harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Selain sebagai seorang pribadi yang individualis manusia juga merupakan makhluk sosial. Sejak lahir manusia memerlukan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa pergaulan hidup dengan sesama manusia, maka manusia yang baru lahir tidak akan dapat menjadi manusia yang sebenarnya. Didalam konsep Islam tentang sosialitas manusia menghendaki agar setiap orang Islam selalu

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: Mitra Wacana Media, 1996). 22

memelihara hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, serta menanamkan rasa persaudaraan dan tolong menolong antar sesamanya.<sup>27</sup> Dengan demikian Islam menghendaki agar setiap muslim untuk mengembangkan keseimbangan antar kehidupan individu dan kehidupan sosial.

Secara firah manusia memiliki kekuatan moral yang dibawa sejak lahir dan berkembang bersama dengan perkembangan pribadinya. Manusia dilahirkan dalam kehidupan masyarakat yang sudah jadi, dimana manusia sudah memiliki nilai-nilai baik dan buruk, serta norma sosial yang harus dijalankan. Dalam konsep Islam, moral menempati tempat paling utama setelah manusia beriman kepada Allah,<sup>28</sup> Setiap manusia pasti membutuhkan adanya pedoman hidup yang berupa agama, karena agama merupakan firah manusia yang telah dibawa sejak lahir, bahkan waktu manusia masih berada didalam arwah, mereka sudah mengakui adanya Tuhan atau Allah.<sup>29</sup>

Dari sini jelas, bahwa signifikansi pendidikan harus mampu menjadikan diri siswa sebagai salah satu instrumen perubahan yang mampu melakukan *empowerment* (terhadap tindak korupsi) dan transformasi bagi masyarakat melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan sosial. Melalui pendekatan tersebut, berbagai bentuk pathologi sosial berupa penyimpangan praktik-praktik kehidupan sosial-kemasyarakatan seperti korupsi dapat dianalisis dan dicarikan alternatif solusinya. Secara teori, hanya agama dan moralitas yang dapat membendung korupsi yang kian merajalela di negara kita (Indonesia). Karena dengan beragama pemeluknya bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Serta moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar, atau salah, baik atau buruk.<sup>30</sup> Konseptualisasi moral memiliki beberapa tingkatan, yaitu standar moral, aturan moral, dan pertimbangan moral. Standar moral adalah prinsip-prinsip moral dasar yang paling fundamental yang merupakan basis pijakan atau asumsi untuk menentukan apakah secara moral sebuah tindakan itu diperkenankan atau tidak, baik atau tidak, diterima masyarakat atau tidak. Aturan moral memuat prinsip-prinsip moral yang diderivasikan

---

<sup>27</sup> *Ibid.* 72

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Abudinata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

<sup>30</sup> Poespoprodjo, *Filsafat Moral; Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: CV. Pustaka Grafika, 1999). 32

dari standar moral. Aturan moral merupakan tindakan yang dianggap benar atau salah dengan berdasarkan pada kriteria yang diformulasikan oleh standar moral. Sedangkan pertimbangan moral merupakan evaluasi moral terhadap dimensi kepribadian sekaligus tindakan-tindakan seseorang, baik yang bersifat umum maupun spesifik.<sup>31</sup>

Secara konseptual – baik dari aspek standar moral maupun agama, aturan dan pertimbangan moral – korupsi sangat bertentangan dengan nilai agama dan moral yang ada di dalam sebuah masyarakat. Perbuatan korupsi dapat menyebabkan delegitimasi nilai-nilai agama dan moral yang sudah ada.

### **Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Penerapannya pada siswa Madrasah Ibtidaiyah**

Internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai religius (agama) yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sarannya menyatu dalam kepribadian peserta didik, sehingga menjadi satu karakter atau watak peserta didik.

Dalam kerangka psikologis, internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standart tingkah laku, pendapat dan seterusnya di dalam kepribadian. Freud yakin bahwa superego, atau aspek moral kepribadian berasal dari internalisasi sikap-sikap parental (orang tua).<sup>32</sup> Dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik atau siswa ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi<sup>33</sup> yaitu: *pertama*: tahap transformasi nilai. Dimana ini diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik atau siswa. *Kedua* tahap transaksi nilai, yaitu suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal-balik. *Ketiga*, tahap transinternalisasi, yaitu suatu tahap yang paling dalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif .

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 256

<sup>33</sup> Muhaimin, *Dimensi-Dimensi Studi Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1996). 153

Jadi dikaitkan dengan perkembangan manusia, proses internalisasi harus berjalan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Internalisasi merupakan sentral proses perubahan kepribadian yang merupakan dimensi kritis pada perolehan atau perubahan diri manusia, termasuk di dalamnya pemribadian makna (nilai) atau implikasi respon terhadap makna.

Pendidikan anti korupsi membimbing para generasi bangsa menjadi manusia yang berbudaya anti korupsi, berwatak anti korupsi, bertanggungjawab terhadap problematika korupsi, dan bersosialitas dalam upaya pencegahan korupsi. Karena disadari atau tidak, korupsi pasti juga dialami oleh para generasi muda. Pada saat tertentu generasi muda dapat menjadi korban korupsi, pelaku korupsi, atau ikut serta juga melakukan atau terlibat perkara korupsi, dan sangat mungkin pula menjadi pihak yang menentang korupsi. Oleh karena itu, dalam aspek pendidikan dasar seperti di Madrasah Ibtidaiyah (MI/SD sederajat) penanaman nilai-nilai antikorupsi harus selalu ditegakkan, sebagaimana mengacu pada beberapa literatur mengenai pendidikan antikorupsi, bahwa nilai-nilai yang harus ditanamkan sejak dini guna mencegah tindakan korupsi ialah tanggung jawab, disiplin, jujur, membiasakan hidup sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli. Dari nilai-nilai tersebut dapat diajarkan melalui pembiasaan di sekolah atupun melalui integrasi mata pelajaran seperti pada pendidikan agama islam dan pendidikan kewarganegaraan, dimana keduanya menjad tumpuhan besar tersebarnya pendidikan anti korupsi untuk dapat dikenal dan diketahui serta dimiliki oleh setiap peserta didik.

Menurut penulis dalam pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada anak usia dasar (MI/SD sederajat) tentang penanaman antikorupsi begitu juga penanam nilai-nilai positif lain, setidaknya ada lima metode yang dianggap efektif untuk digunakan yaitu; *pertama* metode pengawasan, *kedua* pembiasaan, *ketiga* keteladanan, *keempat* reward and punishment, *kelima* metode dialog.<sup>34</sup>

*Pertama*, siswa harusnya diberikan pengawasan agar senantiasa jujur dalam berkata dan berbuat dan memberikan pengertian mengenai bahaya yang timbul akibat ketidak-jujuran. Pengawasan

---

<sup>34</sup> Achmad Anwar Abidin and Muammar Luthfi, "Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Di Kabupaten Jombang," *Jurnal Didaktika* 17, no. 1 (2016): 18–37, doi:<http://dx.doi.org/10.22373/jid.v17i1.1587>.



yang dilakukan ada yang berbentuk pengawasan secara internal yang dilakukan oleh orang tua dan guru pengawasan internal sangat diperlukan terkait kebiasaan siswa di sekolah, bagaimana ia bergaul dengan temannya. ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan misalnya: Cara bertutur kata, kecenderungan dalam memilih teman, dan pengidolaan tokoh anak saat dirumah dan disekolah. Pengawasan Eksternal juga perlu dilakukan pengawasan terhadap siswa antara lain Kerusakan akibat fenomena kejahatan di masyarakat, dan keerusakan akibat teman yang jahat. *Kedua* metode pembiasaan bisa diterapkan dalam pendidikan antikourpsi melalui cara membiasakan anak agar menjaga perbuatan dari hal-hal buruk seperti halnya berbohong, mencuri, mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Apabila pembiasaan ini dilakukan dari usia dini akan menjadi benteng yang kuat bagi mereka pada masa depan karena sudah terbiasa tidak mau dan tidak diperbolehkan melakukan hal-hala buruk tersebut.

*Ketiga* metode keteladanan yaitu dengan pemberian contoh yang baik (Uswatun khasanah) terhadap anak-anak yang belum begitu kritis akan banyak mempengaruhi tingkah laku sehari-harinya. Dalam penanaman nilai antikorupsi anak harus diberikan keteladanan dalam pergaulan, berpakaian, serta dalam peribadatan. Apa yang disampaikan guru akan lebih mudah diserap oleh peserta didik jika dibarengi dengan upaya pemberian keteladanan dan contoh yang nyata terhadap siswa. *Keempat* metode pemberian *Reward and Punishment* dapat diterapkan dalam rangka menanamkan aturan-aturan islami menyangkut masalah ibadah dan etika, khususnya budaya antikorupsi. Bagi anak yang telah mematuhi aturan yang dicanangkan kepada mereka, mereka berhak mendapat hadiah meskipun hanya sanjungan dan pujian. Namun apabila melanggar, mereka harus diberi hukuman meskipun hanya berupa teguran. *Kelima* metode dialog, metode ini sangat bermanfaat dalam menanamkan dasar-dasar antikorupsi pada anak, sebab salah satu naluri anak yang paling umum adalah selalu ingin tahu terutama dalam hal-hal yang menarik perhatiannya. Metode tanya jawab tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga dapat dilakukan di luar kelas. Guru sebaiknya memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteaksi dan sharing tentang hal-hal yang diluar akademis, tentang phan aktual seputar antikorupsi.

Internalisasi nilai-nilai anti korupsi yang diadaptasi dari nilai-nilai agama dan moral dilakukan melalui pembiasaan dan keteladanan yaitu dengan jalan membiasakan siswa untuk bertingkah laku anti korupsi

mulai dari korupsi waktu, sampai korupsi uang jajan. Dan dalam pembiasaan harus diiring dengan keteladan dari guru dan orang tua siswa yang arahnya untuk menumbuhkan kebiasaan berakhlak baik seperti; kejujuran, adil, berlaku benar, memelihara lidah, tiada dusta, yang kesemuanya itu dapat bermanfaat untuk membentuk pribadi siswa. Dalam hal ini, orang tua atau pendidik harus mampu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari maka dalam diri siswa akan tertanam kepribadian yang baik. Contoh, siswa terbiasa menerima perilaku adil dan dibiasakan berbuat adil, maka dalam diri pribadi anak akan tertanam rasa keadilan dan akan menjadi salah satu unsur pribadinya.

### Catatan Akhir

Upaya pencegahan perilaku korupsi bisa dilakukan dengan dua langkah, yaitu langkah *represif* dan *preventif*. Langkah *represif* dilakukan dengan cara menjalankan penegakan hukum yang tegas oleh para aparat penegak hukum. Adapun langkah *preventif* melalui pendidikan, dilakukan dengan cara internalisasi nilai-nilai antikorupsi terhadap peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Konsep pendidikan antikorupsi yang digagas sebagai solusi atas permasalahan bangsa adalah upaya mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Secara simplistik, langkah tersebut ditujukan untuk menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*, sehingga dapat mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa.

### Daftar Rujukan

- Abidin, Achmad Anwar, and Muammar Luthfi. "Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Di Kabupaten Jombang." *Jurnal Didaktika* 17, no. 1 (2016): 18–37. doi:<http://dx.doi.org/10.22373/jid.v17i1.1587>.
- Abudinata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Ahmadi, Abu. *Pendidikan Karakter Sebuah Tantangan*. Jakarta: Citra Wacana, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006.

- Arifin. *Imu Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Azhar, Muhammad, and Dkk. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003.
- Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fawa'id, Ahmad, and Sultonul Huda, eds. *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir Dan Fiqih*. Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006.
- Gerungan. *Psikologi Sosial*. Bandung: Mitra Wacana Media, 1996.
- Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*. Edited by Yale University Press, 1968.
- Kemendikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Balai Pustaka, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemah* (2009).
- Lestari, Lilis. "Pendidikan Karakter Di Sekolah." In *Pendidikan Karakter*, n.d.
- Majid, Abdul, and Dian Andayani. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhaimin. *Dimensi-Dimensi Studi Islam*. Surabaya: Karya Abditama, 1996.
- Musfiroh, Tadkiroatun. *Pendidikan Strategis Untuk Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.
- Nasional, Kementrian Pendidikan. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003*. Bandung: Fokus Media, 2009.
- Nasir, Ridlwan, ed. *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer*. Surabaya: IAIN Press, 2006.
- Poespoprodjo. *Filsafat Moral; Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: CV. Pustaka Grafika, 1999.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional (Terj)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Purwanto, Ngalim. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988.

Soebahar, Abd. Halim. *Wawasan Baru Pendidikan Islam*. Pasuruan: PT. Groeda Buana Indah, 1992.

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan. "Laporan Ringkas Survei Prilaku Antikorupsi 2012: Indeks Perilaku Anti Korupsi Dan Indikator Tunggal." Jakarta, 2012.

Suyanto, Agus. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru, 1998.

Yaljan. *Kecerdasan Moral, Aspek Pendidikan Yang Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka, 1997.

Yusuf, Moh. Asror, ed. *Agama Sebagai Kritik Sosial Di Tengah Arus Kapitalisme Global*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.